



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 65 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Satuan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Satuan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Satuan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Satuan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Satuan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SATUAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SATUAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Satuan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Satuan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Satuan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 65**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut tahun 2019-2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan

memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut tahun 2022. Renja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut tahun 2022 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut tahun 2019 – 2024 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata

Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut tahun 2022 yang telah

ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4410); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);
 7. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18)
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461)
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Acara Republik Indonesia Nomor 1540);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Satnadar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Garut;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor4); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor'1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29t Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren

- Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Kabupaten Garut;
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6);
 41. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
 42. Peraturan Bupati Garut Nomor 70 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut;
 43. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan program Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan perlindungan masyarakat Tahun 2022 di Kabupaten Garut dengan memperhatikan aspek kondisi sosial ekonomi masyarakat, kemampuan pemerintah daerah dan kapasitas sumber daya organisasi ya

ng dimiliki serta memperhatikan tantangan perkembangan zaman dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan di Kabupaten Garut;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2022 disusun dengan sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Rensta Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang UU, PP, Perda, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Satpol PP sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Satpol PP berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Satpol PP tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Satpol PP berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2006, dan PP Nomor 38 tahun 2007. indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Satpol PP dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Satpol PP, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD, penjelasan temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten, bagaimana usulan program/kegiatan tersebut diperoleh dan penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta usulan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Satpol PP.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan sasaran Tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya dan penegasan dalam menerapkan Renja serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut tahun 2022 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan –kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sesuai dengan Rencana Strategis (Rensta) Tahun 2014 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2022 dalam rangka

mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Garut.

Sasaran dan indikator kinerja pembangunan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	80 %
		Persentase Penanganan Gangguan Tibum Tranmas	45%
		Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	53
		Persentase aparatur Sat. Pol. PP dan linmas yang Yang memenuhi standar kualifikasi	40 %
		Persentasi Warga yang mendapatkan pelayanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada	100%

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian sasaran beserta target dan realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 Sesuai Permendagri No.13 tahun 2016 Kabupaten Garut

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT				21.969.325.000				6.023.814.050				
1.05.1.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	1.273.500.000	100	%	100	452.860.000				
1.05.1.05.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Telepon dan Listrik	12	Bulan	25.000.000	12	100	12	15.720.000	12	15720000	100	100,00
1.05.1.05.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional - Roda 4 - Roda 2	50	Unit	30.000.000	50	100	50	40.450.000	50	40450000	100	100,00
1.05.1.05.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Alat Kebersihan - Jumlah Petugas Kebersihan	17	Jenis	36.000.000	17	100	17	42.177.500	15	42177500	88	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020					
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)	
1.05.1.05.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	40	Jenis	80.000.000	40	100	40	69.470.000	43	69470000	108	100,00
1.05.1.05.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	7	Jenis	35.000.000	7	100	7	38.451.500	7	38451500	100	100,00
1.05.1.05.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15	Jenis	40.000.000	15	100	15	2.163.000	15	2163000	100	100,00
1.05.1.05.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	2696	Orang	120.000.000	2696	100	12	21.720.000	3	21720000	25	100,00
1.05.1.05.01.01.056.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	15	Unit	175.000.000	15	100	15	85.658.000	6	85658000	40	100,00
1.05.1.05.01.01.077.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	70	Kali	110.000.000	70	100	70	54.140.000	60	54140000	86	100,00
1.05.1.05.01.01.087.	Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Anggota yang mendapatkan Asuransi	348	Orang	472.500.000	348	100	12	40.080.000	12	40080000	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020					
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)	
1.05.1.05.01.01.092.	Rapat-Rapat Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Lur Daerah	53	Kali	150.000.000	53	100	53	42.830.000	42	42769000	79	99,86
1.05.1.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur ber kondisi baik	100		7.581.994.000	100	100	100	1.253.086.550	0	1253085750	-	100,00
1.05.1.05.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Pemenuhan Gredung Kantor	1	Gedung	5.161.000.000	1	100		0	0	0	-	-
1.05.1.05.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	7	Kend	1.371.205.000	7	100	4	806.432.000	4	806432000	100	100,00
1.05.1.05.01.02.010.	Pengadaan Meubeulair	Jumlah Mabeulair	9	Jenis	135.000.000	9	100	9	114.106.000	9	114106000	100	100,00
1.05.1.05.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	50	Kend	195.080.000	50	100	50	308.688.550	60	308687750	120	100,00
1.05.1.05.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja Kantor	Jumlah peralatan kerja kantor yang dipelihara	18	Unit	11.110.000	18	100	18	3.860.000	18	3860000	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020					
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)	
1.05.1.05.01.02.327.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Senjata Api	Jumlah Senjata Api	6	Unit	20.000.000	6	100	6	20.000.000	6	20000000	100	100,00
1.05.1.05.01.02.328.	Pengadaan Pakaian Dinas Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Sat. Pol. PP	198	Stel	296.307.000	198	100	198	0	0	0	-	-
1.05.1.05.01.02.329.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Satpol PP	Jumlah Pakaian Dinas Sat. Pol. PP	205	Stel	392.292.000	205	100	205	0	0	0	-	-
1.05.1.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	-		75.000.000	-	-	-	0				
1.05.1.05.01.06.030.	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD				-	-			-	0	0	-	-
1.05.1.05.01.06.065.	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD				-	-			-	0	0	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		
1.05.1.05.01.06.092.	Kegiatan Pengumpulan Data Kejadian Trantibum				75.000.000		100		0	0	0	-	-
1.05.1.05.01.07.	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	-		50.000.000	-	100	-	0				
1.05.1.05.01.07.001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD				50.000.000		100		0				
1.05.1.05.01.11.	Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%		0	10000 %		10000%	-				
1.05.1.05.01.11.001.	Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan	12	Laporan	-	12		12	-	0	0	-	-
1.05.1.05.01.11.002.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	16	Dokumen	-	16	100	16	-	0		-	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020							
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)			
1.05.1.05.01.24.	Program Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	-		1.099.900.000	-		-	300.207.500		300125500		
1.05.1.05.01.24.001.	Penindakan Perijinan Tertentu	Jumlah perusahaan	322	Perusahaan	150.000.000	322	100	322	52.300.000	11	52270000	3	99,94
1.05.1.05.01.24.002.	Penindakan Yustisi dan Non Yustisi Pelanggaran Perda				250.000.000				0	0	0	-	-
1.05.1.05.01.24.003.	Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Perda dan Perkada				150.000.000				0	0	0	-	-
1.05.1.05.01.24.004.	Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada	292	Pelanggaran	349.900.000	292	100	292	190.688.500	62	190636500	21	99,97
1.05.1.05.01.24.006.	Sinergitas Penanganan Perda dan Perkada Terpadu	Jumlah kesepakatan penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	6	Kegiatan	200.000.000	6	100	6	57.219.000	7	57219000	117	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		
1.05.1.05.01.25.	Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	-	6.203.848.000	-		-	3.846.703.500		3846703500			
1.05.1.05.01.25.001.	Kegiatan Penyuluhan Trantibum	Jumlah Masyarakat yang diberikan Penyuluhan	440	Orang	118.360.000	440	100	440	19.615.000	80	19615000	18	100,00
1.05.1.05.01.25.002.	Kegiatan Patroli Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman	Jumlah Patroli Pencegahan Gangguan Trantibum	360	Kali	2.194.709.000	360	100	360	1.454.132.500	270	1454132500	75	100,00
1.05.1.05.01.25.003.	Monitoring dan Evaluasi Trantibum	Jumlah monitoring tibus tranmas	5	Kegiatan	94.095.000	5	100	5	20.965.000	5	20965000	100	100,00
1.05.1.05.01.25.004.	Kegiatan Peningkatan Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	Jumlah Kegiatan Gelar Pasukan Sat Pol PP dan Linmas Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta Jambore Tingkat Provinsi dan Nasional	6	Kegiatan	343.365.000	6	100	6	76.958.000	1	76958000	17	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020					
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)	
1.05.1.05.01.25.005.	Penertiban Gangguan Tibum Tranmas	Jumlah Pengamanan dan Penertiban PKL di Wilayah Perkotaan	114	Kali	2.142.139.000	114	100	360	1.361.650.000	270	1361650000	75	100,00
1.05.1.05.01.25.006.	Kegiatan Pengamanan Tertentu	Jumlah Kegiatan Pengamanan Gangguan Trantibum	360	Kali	1.311.180.000	360	100	360	913.383.000	270	913383000	75	100,00
1.05.1.05.01.26.	Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Linmas aktif dan terlatih	-		3.295.173.000	-		-	124.990.000		125.080.000		
1.05.1.05.01.26.001.	Kegiatan Gelar Pasukan Linmas	Jumlah Gelar Pasukan Linmas dalam rangka HUT dan PHBN	13	Kali	98.779.000	13	100	13	4.600.000	1	4.600.000	8	100,00
1.05.1.05.01.26.002.	Kegiatan Pemberdayaan Linmas dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah kegiatan linmas dalam trantibmas	115	Hari	235.792.000	115	100	115	71.050.000	52	71.050.000	45	100,00
1.05.1.05.01.26.003.	Kegiatan Pengadaan Pakaian PDL dan Sarana Prasarana Linmas	Jumlah linmas yang mendapatkan pakaian dan sarana prasarana linmas	2000	Stel	2.107.530.000	2000	100	2000	0	0	0	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020					
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)	
1.05.1.05.01.26.004.	Kegiatan Updating data Sarana Prasarana dan Anggota Sat Linmas				64.880.000				0	0	0	-	-
1.05.1.05.01.26.005.	Kegiatan Pengamanan Evakuasi Korban Bencana Alam	Jumlah evakuasi korban bencana alam	41	Kai	133.462.000	41	100	41	49.340.000	34	49430000	83	100,18
1.05.1.05.01.26.006.	Kegiatan Sosialisasi cegah dini bencana alam				114.790.000				0	0	0	-	-
1.05.1.05.01.26.007.	Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas				61.575.000				0	0	0	-	-
1.05.1.05.01.26.008.	Kegiatan Diklat Dasar Sat Linmas				196.290.000				0	0	0	-	-
1.05.1.05.01.26.009.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Sat Linmas	Jumlah Linmas yang Siaga menghadapi Potensi Bencana Alam yang disebarluaskan	25	Orang	282.075.000	25	100		0	0	0	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020							
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)			
1.05.1.05.01.27.	Program Pengembangan Profesionalisme Satpol PP	Presentase Satpol PP yang terlatih	-		2.539.910.000	-		-	45.966.500				
1.05.1.05.01.27.001.	Kegiatan Pengawasan Aparatur Satpol PP	Jumlah pengawasan aparatur SatpolPP	12	Bulan	65.950.000	12	100	12	9.857.500	9	9810000	75	99,52
1.05.1.05.01.27.002.	Kegiatan Pengendalian Aparatur Satpol PP				55.825.000		100		0	0	0	-	-
1.05.1.05.01.27.003.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar	Jumlah Anggota Sat. Pol. PP yang mengikuti Diklat Dasar	15	Orang	65.200.000	15	100	15	0	0	0	-	-
1.05.1.05.01.27.004.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Deteksi Dini				221.400.000		100		0	0	0	-	-
1.05.1.05.01.27.005.	Kegiatan Pengembangan Aparatur Satuan Unit Satpol PP	Jumlah Aparatur Satuan Unit Pol PP yang Mengikuti Pelatihan	40	Orang	215.000.000	40	100	40	25.665.000	9	25665000	23	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		
1.05.1.05.01.27.006.	Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparatur Satpol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksanaan	Jumlah Aparatur Sat. Pol. PP. Yang mengikuti Pelatihan	135	Orang	40.112.000	135	100	40	10.444.000	9	10444000	23	100,00
1.05.1.05.01.27.007.	Kegiatan Pembentukan Satgas Pol PP				19.237.000				0	0	0	-	-
1.05.1.05.01.27.008.	Kegiatan Optimalisasi Satgas Pol PP Merpati	Presentase Aparatur SatpolPP terlatih terlatih	28	Orang	1.007.711.000	28	100	28	0	0	0	-	-
1.05.1.05.01.27.009.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PPNS	Jumlah aparatur satpol pp yang mengikuti diklat PPNS bagi Aparatur Sat. Pol. PP.	25	Orang	849.475.000	25	100	25	0	0	0	-	-
					22.119.325.000				6.023.814.050				

**Capaian Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2021
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 Sesuai Permendagri No.90 Tahun 2019
Kabupaten Garut**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (TW 2)
1	2	3	4		5	6
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100%	7.277.426.298	3.966.728.361	55%
01.05.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	100%	40.000.000	20.600.000	52%
01.05.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	16 Dokumen	40.000.000	20.600.000	10 Dokumen
01.05.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD (Satpol PP)	100%	5.440.276.948	2.712.974.658	50%
01.05.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satpol PP)	12 Bulan	5.385.486.948	2.685.579.658	6 Bulan
01.05.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Sat. Pol. PP	10 Laporan	54.790.000	27.395.000	5 Laporan
01.05.01.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100%	631.484.000	597.954.000	95%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (TW 2)
1	2	3	4		5	6
01.05.01.06.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah pakaian dinas lapangan dan Jumlah pakaian dinas tertentu	200 stel	631.484.000	597.954.000	200 stel
01.05.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Satpol PP)	100%	497.462.190	291.034.160	59%
01.05.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	16 jenis	16.830.000	13.317.900	13 jenis
01.05.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor, Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	30 Jenis dan 10 Jenis	145.893.690	125.709.460	26 Jenis dan 8 Jenis
01.05.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan	11 Jenis dan 30532 Lembar	32.150.200	14.521.800	5 jenis dan 13.740
01.05.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai/ Tamu	1860 Orang	44.400.000	28.992.000	1209 orang
01.05.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	78 kali	258.188.300	108.493.000	33 kali
01.05.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100%	147.868.000	138.800.000	94%
01.05.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	5 kendaraan	147.868.000	138.800.000	4 kendaraan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (TW 2)
1	2	3	4		5	6
01.05.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Satpol PP)	100%	64.715.160	35.083.100	54%
01.05.01.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	27.647.360	10.897.800	6 bulan
01.05.01.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan upah kerja pegawai kebersihan	12 Bulan dan 4 Orang	37.067.800	24.185.300	6 bulan dan 4 orang
01.05.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100%	547.620.000	170.828.443	37%
01.05.01.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas Jabatan	5 kendaraan	9.000.000	6.750.000	3 kendaraan
01.05.01.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan Jumlah Pembayaran Pajak kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	50 Kendaraan dan 45 Kendaraan	235.610.000	108.634.200	46 kendaraan
01.05.01.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan halaman kantor, jumlah penataan interior, mabeulair sesuai dengan kebutuhan presentase gedung kantor	1 Lokal dan 5 Lokal	292.500.000	44.398.243	1 lokal dan 5 lokal (22%)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (TW 2)
1	2	3	4		5	6
01.05.01.09.1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	15 unit	10.510.000	10.500.000	15 unit
01.05.02'	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman dan perlindungan masyarakat	85%	6.592.225.500	2.961.857.134	44%
01.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman umum	85%	5.977.035.500	2.549.414.634	44%
01.05.02.01.0 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	720 Orang dan 12 Bulan	1.884.709.000	876.438.050	338 orang dan 6 bulan
01.05.02.01.0 2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah penertiban dan pengamanan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	12 bulan	2.817.491.000	1.032.310.084	6 bulan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (TW 2)
1	2	3	4		5	6
01.05.02.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Kegiatan Trantibum dan Linmas	10 kali dan 121 kali	136.375.000	23.059.000	2 kali dan 21 kali
01.05.02.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanganan Bencana	200 Kali dan 60 Kali	237.500.000	117.150.000	98 kali dan 30 kali
01.05.02.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Pengawasan Aparatur Satpol PP dan Linmas serta Jumlah peningkatan kapasitas SDM	40 Orang dan 30 Orang	157.250.000	149.620.000	40 orang dan 30 orang
01.05.02.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan	4 kali	297.048.000	11.745.000	4 kali
01.05.02.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana Prasarana SatpolPP dan Linmas	215 Stel dan 6 Unit	361.202.500	339.092.500	202 dan 5 unit
01.05.02.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Penegakan Perda dan Perkada	85%	919.472.000	412.442.500	45%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (TW 2)
1	2	3	4		5	6
01.05.02.02..01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	56 kali	129.820.000	122.342.500	53 kali
01.05.02.02..02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	84 kali	65.930.000	31.765.000	41 kali
01.05.02.02..03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	292 Pelanggar dan 322 Perusahaan	723.722.000	258.335.000	105 pelanggar dan 116 perusahaan
Jumlah				13.961.651.798	10.575.487.240	

2.2. Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut

Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut tahun 2022 permasalahan yang muncul saat ini perlu diidentifikasi secara komprehensif, agar hambatan yang mendesak dalam melaksanakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat diatasi. Dengan demikian, rencana kerja dapat tepat sasaran dan mampu menjawab semua permasalahan nyata yang dihadapi.

Permasalahan strategi yang harus menjadi perhatian selama tahun 2022 sehingga dapat direncanakan menjadi prioritas kinerja dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 terkait dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2019-2024 :

- 1) Meningkatnya penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
- 2) Meningkatnya kapasitas aparatur Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Adapun pencapaian kinerja pelayanan SKPD tahun 2020 sebagai bahan rencana tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut
Sebelum Perubahan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian	
				2021	2022	2023	2024	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	-	√	75 %	70%	65%	60%	85%	80%
2	Persentase Penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	√	60%	75%	85%	90%	45%	45%
3	Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	-	√	60	65	75	84	53	62
	Persentase Aparatur Satpol PP dan Linmas yang memenuhi standar kualifikasi		√	55%	70%	85%	100%	25%	40%
4	Prosentase jumlah warga yang terdampak gangguan Trantibum akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada yang mendapatkan pelayanan	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Garut
Setelah Perubahan**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Pencapaian Kinerja	
				2020	2021 (TW2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	√	45%	44%
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	-	√	45%	44%
	Persentase Aparatur Satpol PP dan Linmas yang memenuhi Standar Kualifikasi				

2.2.1. Perkembangan Capaian Kinerja

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2020 sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.452.860.000,- dengan realisasi sebesar Rp.433.613.800,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp.15.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp.13.527.500,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah dan bukti pembayaran rekening telepon, air dan listrik sebanyak 12 Bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Kelancaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 86%;
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp.40.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp.38.065.900,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas Roda 4 dan Roda 2. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Kelancaran Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional sebesar 94%;
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.42.177.500,- dengan realisasi sebesar Rp.42.177.500,-. Sasaran kegiatan ini yaitu Terpenuhinya kebersihan lingkungan kerja. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah alat kebersihan serta Jumlah pembayaran petugas kebersihan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Pemeliharaan

- Kebersihan Kantor sebesar 100%;
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.69.470.000,- dengan realisasi sebesar Rp.69.468.950,-. Lokasi kegiatan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebesar 100%;
 5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp.38.451.400,- dengan realisasi sebesar Rp.38.450.450,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah jumlah jenis barang cetakan yang tersedia sebanyak 7 jenis. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebesar 100%;
 6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.2.163.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.163.000,-. Lokasi kegiatan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 15 Jenis Alat listrik. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 100%;
 7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan anggaran sebesar Rp.21.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp.21.720.000,- Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output

- dari kegiatan ini adalah jumlah peserta rapat yang disediakan Makanan dan Minuman serta jumlah tamu yang disediakan makanan dan minuman sebanyak 2736 orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya penyediaan makan dan minum rapat dan tamu sebesar 100%;
8. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.85.658.000,- dengan realisasi sebesar Rp.85.571.500,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sebanyak 19 Unit/Alat peralatan dan perlengkapan kantor. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebesar 100%;
 9. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.54.140.000,- dengan realisasi sebesar Rp.54.140.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan sebanyak 1 Kali koordinasi dan 70 Kali. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dengan instansi lain sebesar 100%;
 10. Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp.40.080.000,- dengan realisasi sebesar Rp.25.560.000,-. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya Jumlah Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebanyak 338 Orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah

tersedianya Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebesar 64%.

11. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.42.830.000,- dengan realisasi sebesar Rp.42.769.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah koordinasi dan konsultasi yang disediakan sebanyak 53 Kali. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dengan instansi lain sebesar 100%;

2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.1.253.086.550,- dengan realisasi sebesar Rp.1.253.057.095,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp.806.432.000,- dengan realisasi sebesar Rp.806.432.000,-. Lokasi kegiatan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang layak Pakai sebanyak 2 Unit Kendaraan Roda 4. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah persentase sarana dan prasarana tersedia sesuai kebutuhan sebesar 100%;
2. Kegiatan Pengadaan Meubeulair, dengan anggaran sebesar Rp.114.106.000,- dengan realisasi sebesar Rp.114.106.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Jenis Meubelair sarana

penunjang aparatur sebanyak 9 Jenis Meubelair. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah persentase sarana dan prasarana tersedia sesuai kebutuhan sebesar 100%;

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp.308.668.095,- dengan realisasi sebesar Rp.308.860.095,- Lokasi kegiatan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terawat sebanyak 13 Unit Kendaraan Dinas Roda Empat dan 36 Unit Kendaraan Roda Dua. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah persentase kelancaran operasional kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebesar 100%;
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.3.860.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.860.000,- Lokasi kegiatan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan Kerja Kantor yang terawat sebanyak 18 Unit. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah persentase kelancaran kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebesar 100%;
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Senjata Api, dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.20.000.000,- Lokasi kegiatan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan senjata api yang terawat sebanyak 6 Unit. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah persentase kelancaran kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebesar 100%;
6. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Tertentu, dengan anggaran sebesar Rp.537.190.000,- dengan realisasi

sebesar Rp.0,- Lokasi kegiatan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah jumlah pengadaan Pakaian Dinas Tertentu sebanyak 194 Stel. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah persentase sarana dan prasarana penunjang kerja dengan baik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebesar 100%; tetapi kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan dikarenakan ada efisiensi Anggaran pada Tahun 2020 Pandemi Covid 19.

7. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan anggaran sebesar Rp.321.725.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- Lokasi kegiatan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah jumlah pengadaan Pakaian Dinas Tertentu sebanyak 197 Stel. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah persentase sarana dan prasarana penunjang kerja dengan baik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebesar 100%; tetapi kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan dikarenakan ada efisiensi Anggaran pada Tahun 2020 Pandemi Covid 19.

3) Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan;

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.50.00.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelaporan Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,-. Lokasi kegiatan yaitu ada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pelaporan SatpolPP sebanyak 10 Laporan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Nilai

hasil evaluasi sakip B, kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan dikarenakan ada efisiensi Anggaran pada Tahun 2020 Pandemi Covid 19.

2. Kegiatan Penyusun Dokumen Perencanaan SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,-. Lokasi kegiatan yaitu ada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD sebanyak 16 Laporan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Nilai hasil evaluasi sakip B, kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan dikarenakan ada efisiensi Anggaran pada Tahun 2020 Pandemi Covid 19.

4) Program Penegakan Perda dan Perkada.

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.300.207.500,- dengan realisasi sebesar Rp.300.125.500,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Kegiatan Penindakan Perijinan Tertentu, dengan anggaran sebesar Rp.52.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp.52.270.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Perusahaan sebanyak 322 Perusahaan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Prosentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada sebesar 60%;
2. Kegiatan Penegakan Perda dan Perkada, dengan anggaran sebesar Rp.190.688.500,- dengan realisasi sebesar Rp.190.636.500,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Penegekan Perda dan Perkada sebanyak 292 Pelanggar. Hasil yang dicapai dari

kegiatan ini adalah Prosentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada sebesar 60%;

3. Kegiatan Sinergitas Penanganan Perda dan Perkada Tertentu, dengan anggaran sebesar Rp.57.219.000,- dengan realisasi sebesar Rp.57.219.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah kesepakatan penanganan pelanggaran Perda dan Perkada sebanyak 50 Kali. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Prosentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada sebesar 60%.

5) Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.3.846.703.500,- dengan realisasi sebesar Rp.3.836.745.900,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyuluhan Trantibum, dengan anggaran sebesar Rp.19.615.000,- dengan realisasi sebesar Rp.19.615.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Masyarakat yang diberikan penyuluhan sebanyak 80 Orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Prosentase penanganan gangguan tibum tranmas sebesar 45%;
2. Kegiatan Patroli Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp.1.545.132.500,- dengan realisasi sebesar Rp.1.450.984.900,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Patroli Pencegahan Gangguan Tibum Tranmas sebanyak 360 Kali. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Prosentase penanganan gangguan

- tibum tranmas sebesar 45%;
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Trantibum, dengan anggaran sebesar Rp.20.965.000,- dengan realisasi sebesar Rp.20.965.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Monitoring Tibum Tranmas sebanyak 5 Kegiatan hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Prosentase penanganan gangguan tibum tranmas sebesar 45%;
 4. Kegiatan Peningkatan Sinergitas Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan anggaran sebesar Rp.76.958.000,- dengan realisasi sebesar Rp.76.958.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Gelar Pasukan SatpolPP dan Linmas Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta Jambore Tingkat Provinsi dan Nasional sebanyak 6 Kegiatan hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Prosentase penanganan gangguan tibum tranmas sebesar 45%;
 5. Kegiatan Penertiban Gangguan Tibum Tranmas, dengan anggaran sebesar Rp.1.361.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.354.850.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Pengamanan dan Penertiban PKL serta Jumlah Pencegahan Penyebarluasn Covid-19 di Wilayah Kabupaten Garut Kegiatan hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Prosentase penanganan gangguan tibum tranmas sebesar 45%;
 6. Kegiatan Pengamanan Tertentu, dengan anggaran sebesar Rp.913.383.000,- dengan realisasi sebesar Rp.913.373.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari

kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan pengamanan Gangguan Trantibum sebanyak 360 Kali di Wilayah Kabupaten Garut Kegiatan hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Prosentase penanganan gangguan tibus tranmas sebesar 45%.

6) Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat.

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.124.990.000,- dengan realisasi sebesar Rp.124.990.000,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Gelar Pasukan Linmas, dengan anggaran sebesar Rp.4.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.600.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satpol PP Kab. Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Gelar Pasukan Linmas dan Rangka HUT POLPP dan PHBN sebanyak 13 Kali. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Prosentase linmas yang aktif sebesar 53 %;
2. Kegiatan Pemberdayaan Linmas dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp.71.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp.71.050.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satpol PP Kab.Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan linmas dalam trantibmas sebanyak 115 Hari. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Prosentase linmas yang aktif sebesar 53 %;
3. Kegiatan Pengamanan Evakuasi Bencana Alam, dengan anggaran sebesar Rp.49.340.000,- dengan realisasi sebesar Rp.49.340.000,-. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah evakuasi bencana alam dan pemantauan pencegahan penyebaran Covid-19. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Prosentase linmas yang aktif sebesar 53 %;

7) Program Pengembangan Profesionalisme Satpol.PP.

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.45.968.000,- dengan realisasi sebesar Rp.45.968.000,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengawasan Aparatur SatpolPP, dengan anggaran sebesar Rp.9.857.500,- dengan realisasi sebesar Rp.9.820.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah pengawasan Aparatur SatpolPP sebanyak 9 Kali. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Prosentase aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi sebanyak 40%;
2. Kegiatan Pengembangan Aparatur Satuan Unit SatpolPP, dengan anggaran sebesar Rp.25.665.000,- dengan realisasi sebesar Rp.25.665.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Aparatur Satuan Unit yang mengikuti pelatihan sebanyak 40 Orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Prosentase aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi sebanyak 40%;

Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparatur SatpolPP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan, dengan anggaran sebesar Rp.10.444.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.444.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Aparatur Satuan Unit yang mengikuti pelatihan sebanyak 45 Orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Prosentase aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi sebanyak 40%.

Adapun capaian kinerja Bidang Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat.

1. Pelaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Trantibum

a) Pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat)

Permasalahan penyakit masyarakat (PEKAT) di Kabupaten Garut khususnya dalam konteks pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perbuatan Anti Maksiat, selama kurun waktu Tahun 2020 masih tetap menggejala.

(1) Dalam penanggulangan permasalahan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut telah melakukan Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) sebanyak 5 kali dan terjaring sebanyak 21 PSK dan tindak lanjut penanganannya di koordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Garut;



(2) Barang bukti Miras sebanyak 1.322 botol dari berbagai Merk dari 6 Kali kegiatan operasi dan patroli, dimusnahkan bersama Bea Cukai pada bulan Juli 2020 sebanyak 1.102 botol dan diserahkan ke Polres Garut tanggal 21 Desember 2020 sebanyak 169 botol dan sisa hasil operasi tanggal 23 Desember 2020 sebanyak 51 botol;



b) Pelaksanaan kegiatan Gerakan Disiplin Daerah (GDD)

Berdasarkan Perintah Pimpinan (Bapak Bupati Garut) yaitu melaksanakan GDD mulai Bulan Juni sampai dengan Desember 2020. Dengan surat perintah Tugas kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang ditandatangani oleh Bupati Garut Nomor: 800/10191/Sat Pol PP tanggal 18 Juni 2020 .dan surat Perintah Tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Bidang dan Sekertaris di Lingkungan Sat Pol PP Nomor : 800 /513 –Sat Pol PP/2020 tanggal 24 Juni 2020.

Untuk melaksanakan Gerakan disiplin Daerah mulai tanggal 22 Juni sampai dengan 31 Desember 2020, tetapi pada perjalannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut tidak bisa melaksanakan sampai ahir bulan Desember 2020 dikarenakan mulai bulan Agustus 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut di hadapkan kepada penanganan dan penegakan penerapan Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di Kabupaten Garut, yang mana yang terjangkit covid 19 dari hari kehari terus bertambah dan sangat menghawatirkan bagi masyarakat Kabupaten Garut.

(1) Gerakan Disiplin Daerah (GDD) PNS dilaksanakan dengan kegiatan insfeksi mendadak (SIDAK) yang langsung didatangi ke stiap SKPD di Wilayah

Kabupaten Garut dan telah dilaksanakan kepada 32 Dinas di tingkat Kabupaten.

(2) Penertiban Anak sekolah yang bolos pada waktu jam belajar sebanyak 12 kali dengan hasil operasi sebanyak 65 orang/Siswa/i (penanganan lebih lanjut diserahkan kepada pihak sekolah masing-masing)



c) Penanganan Unjuk Rasa dan Audensi

Kejadian unjuk rasa, audensi selama tahun 2020 tercatat sebanyak 33 kali. Dari kejadian tersebut seluruhnya berjalan aman, tertib, terkendali dan tidak terjadi hal-hal yang mengarah terhadap tindakan anarkis.



d) Pelaksanaan Pengamanan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dalam upaya mewujudkan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Garut telah dilaksanakan Pengamanan dan penertiban PKL di wilayah Kecamatan

Garut Kota (Pengkolan) dalam kegiatan tersebut melibatkan TNI, POLRI, Dishub, Disperindagpas, Aparat Kecamatan dan Kelurahan setempat.

Kegiatan Penertiban PKL dengan Pola Pengawasan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Perkotaan Kecamatan Garut Kota, sebanyak 356 kali.

Dengan pelaksanaan :

Anggota diploting di beberapa titik, di antaranya :

- Jln. A. Yani (depan BNI);
- Jln. A. Yani (pertigaan pasar baru);
- Jln. A. Yani (depan SMPN 1 dan 2 Garut);
- Alun-alun Garut;
- Jln. Dewi Sartika (depan Lapas Garut).

(1) Anggota Satpol.PP Kab. Garut melakukan Pengawasan dan Pengendalian PKL di Jln. A. Yani (mulai depan Pos Penataan Kota s.d Belokan pasar baru);

(2) Penempatan personil dititik yang sudah ditentukan;

(3) Dilakukan patroli setiap 1 (satu) jam sekali untuk menghindari pedagang yang masuk ke tempat yang dilarang;

(4) Hasil / Kondisi di Lapangan

Setelah dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian dan penempatan personil, fasilitas trotoar dapat berfungsi sesuai peruntukannya dan wilayah yang kumuh sedikit berkurang;

Kendala dilapangan dalam kegiatan penertiban PKL dengan Pola Pengawasan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Perkotaan

- Masih rendahnya tingkat kesadaran warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah sehingga

masih melakukan transaksi dan Usaha PKL di Zona Merah;

- Usaha penertiban dan pengawasan penataan PKL di Zona Merah akan terus dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap, hal ini dilaksanakan dalam upaya meminimalisir kemungkinan terjadinya gesekan dengan warga PKL dan Optimalisasi pengawasan dan pengendaliannya.



e) Pelaksanaan Penertiban Anjal/PMKS dan ODGJ jalanan

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan penertiban Anjal/PMKS dan ODGJ jalan dengan hasil sebagai berikut :

- (a) Penertiban Anjal/ Komunitas Funk sebanyak 9 (sembilan) dengan hasil 34 orang (penanganan lebih lanjut diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Garut);



(b) Penertiban ODGJ jalanan Sebagian besar adalah sebagai tindak lanjut laporan dari warga masyarakat. Pada tahun 2020 telah ditertibkan sebanyak 4 kali (Menentukan Target Lokasi Penertiban ODGJ yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, Koordinasi dengan Pihak lain / SKPD lainnya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.



f) Kegiatan Penyuluhan Trantibum

Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan sosialisasi Perda dan Perkada pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten Garut, pada tahun 2020 telah dilaksanakan penyuluhan Trantibum sebanyak 2 (dua) kali penyuluhan dengan materi Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Pencegahan Gangguan Trantibum, Mekanisme Perijinan dengan jumlah peserta sebanyak 80 peserta dari target 450 orang, tidak tercapainya target dikarenakan terjadinya efisiensi anggaran sebagai dampak terjadinya pandemic Covid-19.





- g) Pengamanan kegiatan lainnya, diantaranya :
- Pengamanan bulan suci Ramadhan;
 - Pengamanan Jalur mudik Hari Raya Idul Fitri 2020;
 - Pengamanan malam takbiran 2020;
 - Pengamanan Malam Natal tahun 2020;
 - Pengamanan Malam Tahun Baru 2021;
 - Pengamanan hari besar nasional dan keagamaan, sebanyak 57 kali.

2. Pelaksanaan Program Perda dan Perkada

a) Kegiatan Penindakan Perijinan tertentu

Pada tahun 2020 berdasarkan data hasil pengaduan dari masyarakat dan LSM ada 87 perusahaan yang melanggar Perda dan Perkada, sesuai tugas fungsi Satpol. PP dilaksanakan pengecekan dan tindak lanjut berupa penindakan terhadap pelanggar.

b) Kegiatan Penegakan Perda dan Perkada

Pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada tahun 2020

- (1) Tindak lanjut hasil pengecekan pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada, diantaranya :
- Pelaksanaan penyegelan 6 Perusahaan yang terbukti melanggar Perda dan Perkada



- Pemberian teguran tertulis bagi 81 perusahaan yang melanggar perijinan (perijinannya telah habis);



- Penertiban Spanduk/ Baligo yang melanggar sebanyak 417 buah;



- Pembongkaran bangunan liar yang melanggar Perda dan Perkada berupa kios sebanyak 44 kios di wilayah Kerkhof, Andir Bayongbong dan Jalan Baru Kadungora;



- (2) Penegakan Perbup No.22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-

19, dengan hasil:

- Pemberian teguran lisan kepada 63 mini market yang melanggar jam operasional pada saat pelaksanaan PSBB ;



- Pemberian Teguran tertulis kepada 6 mini market dan 20 pertokoan yang melanggar jam operasional pada saat pelaksanaan PSBB;



- Teguran lisan kepada pelanggar perorangan sebanyak 48.492 orang;



- Teguran tertulis kepada pelanggar perorangan sebanyak 788 orang.



c) Kegiatan Sinergitas Penanganan Perda dan Perkada Terpadu

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan sebanyak 38 kali rapat koordinasi dalam rangka penanganan pelanggaran Perda dan Perkada.



3. Pelaksanaan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi bencana

Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya bencana di Kabupaten Garut, telah dilaksanakan 42 kali pemantauan dan penyebaran Informasi potensi bencana alam ke 42 kecamatan di Kabupaten Garut. Sasaran dilaksanakan ke daerah-daerah yang mengalami musibah bencana dan daerah yang dianggap rentan terhadap terjadinya bencana baik bencana yang diakibatkan oleh alam maupun yang disebabkan oleh perbuatan dan kelalaian manusia.



4. Penyelenggaraan Penegakan Perda, Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kondisi penegakan hukum di Kabupaten Garut sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan. Langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintahan Kabupaten Garut dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberikan kepastian hukum serta ketentraman dalam aktivitas kesehariannya yaitu dengan meningkatkan pelayanan di bidang hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, meningkatkan kesadaran dan budaya hukum serta tertib hukum, semua itu tercermin dengan tidak terjadinya konflik berbasis sara, anarkisme dan separatisme di Kabupaten Garut hanya sebatas menyampaikan aspirasi oleh sekelompok LSM dengan mengerahkan masa, maupun secara individu, tapi masih tetap dalam koridor hukum dan masih dapat diantisipasi oleh aparat keamanan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, sebagai Satuan kerja perangkat daerah dalam Penegakan Perda dan Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat didukung 364 orang pegawai (sesuai dengan Jumlah Pegawai Satpol.PP Kab. Garut per-akhir bulan Desember 2020 terdiri dari 46 orang PNS, 128 orang TKK dan 190 orang TKS).

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yang menunjang terhadap Tema RKPD dan Prioritas

Pembangunan Daerah Tahun 2022 yaitu “Percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat” tertuang pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1.1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;

1.2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;

1.3. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sub Kegiatan:

2.1. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

2.3.1. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

1) Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas, untuk mencapai target yang telah ditetapkan, di atas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

(1) Pemahaman dan Ketaatan masyarakat terhadap Penegakan Perda masih rendah;

- (2) Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungannya;
- (3) Sumber daya Satpol PP dilihat dari kuantitas; belum sebanding dengan jumlah penduduk;
- (4) Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait dan Instansi Vertikal lainnya dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2) Upaya Pemecahan

Dalam rangka upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang tertib, aman nyaman dan kondusif, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut telah melaksanakan upaya pemecahan masalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan upaya-upaya persuasif terhadap masyarakat melalui pendekatan dialogis, dalam upaya mendorong kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk lebih berpartisipasi dalam menciptakan situasi dan kondisi kantrantibmas yang kondusif;
- (2) Intensifitas sosialisasi peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan;
- (3) Mengoptimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM Aparatur Satpol.PP melalui Pembinaan dan pelatihan teknis dalam rangka upaya mewujudkan satpol.PP yang profesional dan proforsional dalam melaksanakan tugas;

- (5) Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dan Instansi Vertikal lainnya dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.

Sebagai upaya mewujudkan tugas pokok Satpol.PP dalam melaksanakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Garut telah disusun rencana program kegiatan tahun 2022 yang terdiri dari 2 program dan 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Yang juga harus menjadi perhatian adalah terkait visi jangka menengah Kabupaten Garut

”Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut yang menjadi bagian dari Satpol.PP adalah :

- **Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan

kehidupan masyarakat.

- **Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- **Sejahtera** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun rumusan Review rencana program dan kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
01:05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
01:05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SatpolPP			18.895.097.128	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SatpolPP			18.895.097.128	
01.05.01'	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SatpolPP	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100%	8.697.840.928	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SatpolPP	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100%	8.697.840.928	
01.05.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SatpolPP	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja sesuai ketentuan (Satpol PP)	100%	44.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SatpolPP	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja sesuai ketentuan (Satpol PP)	100%	44.000.000	
01.05.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SatpolPP	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	16 Dokumen	44.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SatpolPP	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	16 Dokumen	44.000.000	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.05.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>SatpolPP</i>	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD (Satpol PP)		5.984.304.643	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>SatpolPP</i>	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD (Satpol PP)		5.984.304.643	
01.05.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>SatpolPP</i>	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satpol PP)	12 Bulan	5.924.035.643	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>SatpolPP</i>	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satpol PP)	12 Bulan	5.924.035.643	
01.05.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>SatpolPP</i>	Jumlah laporan Sat. Pol. PP	10 Laporan	60.269.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>SatpolPP</i>	Jumlah laporan Sat. Pol. PP	10 Laporan	60.269.000	
01.05.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>SatpolPP</i>	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)		694.632.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>SatpolPP</i>	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)		694.632.400	
01.05.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	<i>SatpolPP</i>	Jumlah pakaian dinas lapangan dan Jumlah pakaian dinas tertentu	200 stel dan 200 stel	694.632.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	<i>SatpolPP</i>	Jumlah pakaian dinas lapangan dan Jumlah pakaian dinas tertentu	200 stel	694.632.400	
01.05.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>SatpolPP</i>	Cakupan Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Satpol PP)		544.422.989	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>SatpolPP</i>	Persentase Cakupan Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Satpol PP)		544.422.989	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.05.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SatpolPP	Jumlah komponen instalasi listrik	16 Jenis	18.518.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SatpolPP	Jumlah komponen instalasi listrik	16 Jenis	18.518.500	
01.05.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SatpolPP	Jumlah Alat Tulis Kantor dan peralatan kantor	30 jenis dan 10 Jenis	157.697.529	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SatpolPP	Jumlah Alat Tulis Kantor, Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	30 jenis dan 10 Jenis	157.697.529	
01.05.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SatpolPP	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	11 Jenis dan 30532 Lembar	35.359.720	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SatpolPP	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan	11 Jenis dan 30532 Lembar	35.359.720	
01.05.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SatpolPP	Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai/ Tamu	1860 Orang	48.840.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SatpolPP	Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai/ Tamu	1860 Orang	48.840.000	
01.05.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SatpolPP	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	141 Kali	284.007.240	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SatpolPP	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	78 Kali	284.007.240	
01.05.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SatpolPP	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)		754.126.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SatpolPP	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100%	754.126.800	
01.05.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SatpolPP	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	754.126.800	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SatpolPP	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	754.126.800	
01.05.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SatpolPP	Cakupan Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Satpol		73.972.096	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SatpolPP	Cakupan Pemenuhan pelayanan administrasi		73.972.096	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			PP)					perkantoran (Satpol PP)			
01.05.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SatpolPP	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	30.412.096	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SatpolPP	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	30.412.096	
01.05.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SatpolPP	Jumlah peralatan kebersihan dan upah kerja pegawai kebersihan		43.560.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SatpolPP	Jumlah peralatan kebersihan dan upah kerja pegawai kebersihan		43.560.000	
01.05.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SatpolPP	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)		602.382.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SatpolPP	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)		602.382.000	
01.05.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SatpolPP	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas Jabatan	5 Kendaraan	9.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SatpolPP	Jumlah pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas Jabatan	5 Kendaraan	9.900.000	
01.05.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	SatpolPP	Jumlah pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	50 Kendaraan dan 45 Kendaraan	259.171.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	SatpolPP	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan Jumlah Pembayaran Pajak kendaraan Dinas Operasional/Lapan	50 Kendaraan dan 45 Kendaraan	259.171.000	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	atau Lapangan					atau Lapangan		gan			
01.05.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SatpolPP	Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	1 Lokal dan 5 Lokal	321.750.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SatpolPP	Jumlah pemeliharaan halaman kantor, jumlah penataan interior, mabeulair sesuai dengan kebutuhan presentase gedung kantor	1 Lokal dan 5 Lokal	321.750.000	
01.05.01.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan yang dipelihara	15 Unit	11.561.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan yang dipelihara	15 Unit	11.561.000	
01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		10.197.256.200	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman dan perlindungan masyarakat		10.197.256.200	
01.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		9.250.547.200	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman umum		9.250.547.200	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.05.02.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	12 Bulan	2.073.179.900	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	12 Bulan	2.073.179.900	
01.05.02.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan UnjukRasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah penertiban dan pengamanan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	12 Bulan	4.077.491.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan UnjukRasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah penertiban dan pengamanan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	12 Bulan	4.077.491.000	
01.05.02.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	SatpolPP	Jumlah Koordinasi Kegiatan Trantibum dan Linmas	121 Kali	150.012.500	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	SatpolPP	Jumlah Koordinasi Kegiatan Trantibum dan Linmas	121 Kali	150.012.500	
01.05.02.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	SatpolPP	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam	200 Kali dan 60 kali	261.250.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	SatpolPP	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan	200 Kali dan 60 kali	261.250.000	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dalamrangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanganan Bencana			dalamrangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Masyarakat dalam Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanganan Bencana			
01.05.02.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	SatpolPP	Jumlah peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan Aparatur SatpolPP dan Linmas	40 Orang dan 30 Orang	345.955.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	SatpolPP	Jumlah Pengawasan Aparatur Satpol PP dan Linmas serta Jumlah peningkatan kapasitas SDM	40 Orang dan 30 Orang	345.955.000	
01.05.02.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalamTeknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SatpolPP	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan	4 Kali	342.658.800	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalamTeknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SatpolPP	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan	4 Kali	342.658.800	
01.05.02.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	SatpolPP	Jumlah Sarana Prasarana SatpolPP dan Linmas	215 Stel dan 6 Unit	2.000.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	SatpolPP	Jumlah Sarana Prasarana SatpolPP dan Linmas	215 Stel dan 6 Unit	2.000.000.000	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.05.02.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Prosentase Penegakan Perda dan Perkada	-	676.709.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Prosentase Penegakan Perda dan Perkada	85 %	676.709.000	
01.05.02.02. .01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SatpolPP	Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	56 Kali	193.600.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SatpolPP	Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	56 Kali	193.600.000	
01.05.02.02. .02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SatpolPP	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	84 Kali	72.523.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SatpolPP	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	84 Kali	72.523.000	
01.05.02.02. .03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SatpolPP	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	292 Pelanggar dan 322 Perusahaan	410.586.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SatpolPP	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	292 Pelanggar dan 322 Perusahaan	410.586.000	
01.05.02.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	SatpolPP	Persentase aparatur satpolpp yang memenuhi standar kualifikasi	-	270.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	SatpolPP	Persentase aparatur satpolpp yang memenuhi standar kualifikasi	90%	270.000.000	
01.05.02.03. 01.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	SatpolPP	Jumlah Aparatur PPNS yang mengikuti Bimtek Pengembangan karir	25 Orang	270.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	SatpolPP	Jumlah Aparatur PPNS yang mengikuti Bimtek Pengembangan karir	25 Orang	270.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan yang masuk hasil pelaksanaan Musrenbang, baik tingkat Desa/ Kelurahan Maupun tingkat Kecamatan, adalah sebagai berikut :

2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tin Persentase aparatur satpolpp yang memenuhi standar kualifikasgkat Kecamatan dan Desa

Usulan program dan kegiatan yang masuk ke Satpol PP Kab. Garut adalah sebanyak 218 usulan, namun sebanyak 119 usulan program dan kegiatan dari 31 kecamatan yang diakomodir dan berkenaan dengan tugas fungsi Satpol PP Kab. Garut sedangkan sebanyak 99 usulan program dan kegiatan tidak bisa diakomodir kemudian diarahkan ke SKPD terkait (seluruh usulan program dan kegiatan yang tidak diakomodir diarahkan adalah pengadaan sarana dan prasarana Siskamling). Alasan ditolaknya usulan program dan kegiatan tersebut karena belum adanya Sub Kegiatan pada Renja Tahun 2022 sehingga disarankan menggunakan dari Anggaran Dana Desa.

Usulan program dan kegiatan yang diakomodir dengan total anggaran sebesar Rp. 763.563.500,- dikelompokan berdasarkan kebutuhannya, yaitu sebagai berikut :

1. Pengadaan pakaian/seragam Linmas sebanyak 61 usulan dengan anggaran sebesar Rp. 479.063.500,-;
2. Pembinaan Linmas Desa sebanyak 47 usulan dengan anggaran sebesar Rp. 233.000.000,-;
3. Pembinaan Anggota Satpol PP sebanyak 10 usulan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-;

4. Penyuluhan Trantibum sebanyak 1 usulan dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku
Kepentingan
Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Garut

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan pakaian/seragam Linmas	Kab. Garut	Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol PP dan Linmas	305 stel	
2	Pembinaan Linmas Desa	Kab. Garut	Jumlah peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan Apatur Satpol PP dan Linmas	233 orang	
3	Pembinaan Anggota Satpol PP	Kab. Garut	Jumlah peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan Apatur Satpol PP dan Linmas	50 orang	
4	Penyuluhan Trantibum	Kab. Garut	Jumlah peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan Apatur Satpol PP dan Linmas	3 orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 terdiri dari 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 tersebut, keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam Prioritas Nasional (PN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 mengusung tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun ketiga dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yaitu :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;

7. Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pada Prioritas Nasional (PN) point (3) diatas yaitu Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan isu strategis salah satu diantaranya adalah Pemenuhan Layanan Dasar dimana salah satu bentuk pelayanan dasar tersebut sesuai Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 diantaranya Kualitas Nilai kehidupan dan Daya Saing Sumber daya Manusia juga Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah sosial.

Sedangkan isu stragis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sesuai RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta social yang dijabarkan dengan misi kesatu yaitu “ Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya”.

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut

Perumusan rencana kerja terlebih dahulu diawali oleh proses analisis mendalam terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi. Oleh karenanya perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi suatu hal yang tidak boleh dihindari, agar senantiasa dapat terjaga korelasi yang positif antara visi, misi serta kebijakan yang tepat untuk

mencapai sasaran yang diharapkan. Demikian juga, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah harus selaras dan sesuai dengan visi, misi, strategi dan kebijakan pemerintah kabupaten dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut adalah “Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”. Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional maupun nasional. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang Tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

- **Sejahtera** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian dan pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk mendukung visi “Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”, yang dijabarkan dalam misi kesatu yaitu “Mewujudkan Kualitas Masyarakat yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Berbudaya”, maka sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu sasaran “Meningkatnya Pengamalan Nilai – Nilai Keagamaan dan Budaya Daerah” dengan strategi Peningkatan Tertib Hukum, Tertib Sosial dan Stabilitas Keamanan. Mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan, maka tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yang hendak dicapai pada tahun 2024 adalah “Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja

Visi dan misi Kabupaten Garut harus dijabarkan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional agar tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dapat tercapai. Tujuan dan sasaran itu dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada tahun
						2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban				Persentase penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	70%
			Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.1.	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban	90%
				1.2.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90%
				1.3	Persentase Aparatur Satpol PP dan Linmas yang memenuhi Standar Kualifikasi	70%

Selain indikator tujuan/ sasaran yang disebutkan di atas berdasarkan Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Acara Republik Indonesia Nomor 1540) dan No.121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar

Sub Urusan Ketetraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai indikator kinerja layanan masyarakat yang terkena dampak penegakan perda/perkada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja SPM Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Garut

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renja Perangkat Daerah Tahun
		NSPK	IKK	Indikator Lain-nya	2022
1	2	3	4	5	8
1	Prosentase jumlah warga yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat dari penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada yang mendapatkan pelayanan				100%

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam pencapaian Target Kinerjanya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut perlu ditunjang dengan program dan kegiatan. Pada tahun 2022 sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdiri dari 2 program dan 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Program dan kegiatan yang dimaksud seperti yang terlihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Garut

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	01:05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	01:05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				18.895.097.128				20.784.606.841
	01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)		100%	8.697.840.928			100%	9.567.625.021
	01.05.01.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)		100%	44.000.000			100%	48.400.000
	01.05.01.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	16 Dokumen	44.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Sekretariat SatpolPP	16 Dokumen	48.400.000

	01.05.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD (Satpol PP)			5.984.304.643				6.582.735.107
	01.05.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul, Sukagalih	12 Bulan	5.924.035.643	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Sekretariat SatpolPP	12 Bulan	6.516.439.207
	01.05.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Sat. Pol. PP	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	10 Laporan	60.269.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Sekretariat SatpolPP	10 Laporan	66.295.900
	01.05.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)			694.632.400				764.095.640
	01.05.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah pakaian dinas lapangan dan Jumlah pakaian dinas tertentu	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	200 stel dan 200 stel	694.632.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Sekretariat SatpolPP	200 stel dan 200 stel	764.095.640
	01.05.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Satpol PP)			544.422.989				598.865.288
	01.05.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Kab. Garut Tarogong Kidul, Sukagalih	16 Jenis	18.518.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Sekretariat SatpolPP	16 Jenis	20.370.350

01.05.01.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor, Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Garut Tarogong Kidul, Sukagalih	30 jenis dan 10 Jenis	157.697.529	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Sekretariat SatpolPP	30 jenis dan 10 Jenis	173.467.282
01.05.01.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan	Kab. Garut Tarogong Kidul, Sukagalih	11 Jenis dan 30532 Lembar	35.359.720	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Sekretariat SatpolPP	11 Jenis dan 30532 Lembar	38.895.692
01.05.01.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai/ Tamu	Kab. Garut Tarogong Kidul, Sukagalih	1860 Orang	48.840.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Sekretariat SatpolPP	1860 Orang	53.724.000
01.05.01.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Garut Tarogong Kidul, Sukagalih	141 Kali	284.007.240	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Sekretariat SatpolPP	141 Kali	312.407.964
01.05.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)			754.126.800				829.539.480
01.05.01.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Garut Tarogong Kidul, Sukagalih	5 Unit	754.126.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Sekretariat SatpolPP	5 Unit	829.539.480
01.05.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan pelayanan administrasi			73.972.096				81.369.306

			perkantoran (Satpol PP)							
	01.05.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut Tarogong Kidul, Sukagalih	12 Bulan	30.412.096	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Sekretariat SatpolPP	12 Bulan	33.453.306
	01.05.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan upah kerja pegawai kebersihan	Kab. Garut Tarogong Kidul, Sukagalih		43.560.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Sekretariat SatpolPP		47.916.000
	01.05.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)			602.382.000				662.620.200
	01.05.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas Jabatan	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan	5 Kendaraan	9.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Saranba dan Prasarana SatpolPP	5 Kendaraan	10.890.000
	01.05.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan Jumlah Pembayaran Pajak kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	SatpolPP Kabupaten Garut	50 Kendaraan dan 45 Kendaraan	259.171.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Saranba dan Prasarana SatpolPP	50 Kendaraan dan 45 Kendaraan	285.088.100
	01.05.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan halaman kantor, jumlah penataan interior, mabeulair sesuai dengan kebutuhan presentase	SatpolPP Kabupaten Garut	1 Lokal dan 5 Lokal	321.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	Saranba dan Prasarana SatpolPP	1 Lokal dan 5 Lokal	353.925.000

			gedung kantor				Umum			
	01.05.01.09.1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	SatpolPP Kabupaten Garut	15 Unit	11.561.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Saranba dan Prasarana SatpolPP	15 Unit	12.717.100
2	01.05.02'	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman dan perlindungan masyarakat			10.197.256.200				11.216.981.820
	01.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman umum			9.250.547.200				10.175.601.920
	01.05.02.01.0 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	SatpolPP Kabupaten Garut	12 Bulan	2.073.179.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Anak Sekolah	12 Bulan	2.280.497.890
	01.05.02.01.0 2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan	Jumlah penertiban dan pengamanan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	SatpolPP Kabupaten Garut	12 Bulan	4.077.491.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat	12 Bulan	4.485.240.100

		UnjukRasa dan Kerusuhan Massa								
	01.05.02.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Kegiatan Trantibum dan Linmas	SatpolPP Kabupaten Garut	121 Kali	150.012.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur SatpolPP	121 Kali	165.013.750
	01.05.02.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalamrangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanganan Bencana	SatpolPP Kabupaten Garut	200 Kali dan 60 kali	261.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Sekretariat SatpolPP	200 Kali dan 60 kali	287.375.000
	01.05.02.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Pengawasan Aparatur Satpol PP dan Linmas serta Jumlah peningkatan kapasitas SDM	SatpolPP Kabupaten Garut	40 Orang dan 30 Orang	345.955.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur SatpolPP	40 Orang dan 30 Orang	380.550.500
	01.05.02.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalamTeknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan	SatpolPP Kabupaten Garut	4 Kali	342.658.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur SatpolPP	4 Kali	376.924.680

01.05.02.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana Prasarana SatpolPP dan Linmas	SatpolPP Kabupaten Garut	215 Stel dan 6 Unit	2.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Sekretariat SatpolPP	215 Stel dan 6 Unit	2.200.000.000
01.05.02.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Penegakan Perda dan Perkada		-	676.709.000			-	744.379.900
01.05.02.02..01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	SatpolPP Kabupaten Garut	56 Kali	193.600.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur, Masyarakat, Badan Hukum dan Pengusaha	56 Kali	212.960.000
01.05.02.02..02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	SatpolPP Kabupaten Garut	84 Kali	72.523.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur, Masyarakat, Badan Hukum dan Pengusaha	84 Kali	79.775.300
01.05.02.02..03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	SatpolPP Kabupaten Garut	292 Pelanggar dan 322 Perusahaan	410.586.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat, Badan Hukum dan Pengusaha	292 Pelanggar dan 322 Perusahaan	451.644.600
01.05.02.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Presentase penegakan perda dan perkada		-	270.000.000			-	297.000.000
01.05.02.03.01.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Aparatur PPNS yang mengikuti Bimtek Pengembangan karir	SatpolPP Kabupaten Garut	25 Orang	270.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur SatpolPP	25 Orang	297.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Tahun 2022

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sedangkan sub kegiatan perangkat daerah adalah menterjemahkan aktivitas/layanan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2022 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tahun 2022 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2024 serta diselaraskan dengan rencana pencapaian tolak ukur kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut 2019-2024. Penetapan indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah TA. 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban	90%
		Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90%
		Persentase Aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang Memenuhi Standar Kualifikasi	70%

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Rencana Program dan Kegiatan disesuaikan dengan pernyataan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Program

Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target
1	2	3	4
Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	90%

		Persentase penegakan perda dan perkara	90%
		Persentase Aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang Memenuhi Standar Kualifikasi	
	Program Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program indikatif kemudian diwujudkan dalam berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran SKPD. Setiap program dan kegiatan diupayakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang telah disusun berdasarkan kode rekening sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dapat dilihat di lampiran. Untuk setiap program. Kegiatan dan sub kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menetapkan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	100%	Sekretariat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD (Satpol PP)	100%	Sekretariat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100%	Sekretariat

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Satpol PP)	100%	Sekretariat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100%	Sekretariat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Satpol PP)	100%	Sekretariat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100%	Sekretariat
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	90%	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase penegakan perda dan perkada	90%	Bidang Penegakan
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase aparatur satpolpp yang memenuhi standar kualifikas	90%	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	16 Dokumen	Agus Sunandi, S. IP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (Satpol PP)	12 Bulan	Agus Sunandi, S. IP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan Sat. Pol. PP	10 Laporan	Rochman Sudjana, ST
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Jumlah Pakaian Kerja Tertentu	200 stel dan 200 stel	Rochman Sudjana, ST
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	16 Jenis	Rochman Sudjana, ST
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 jenis dan 10 Jenis	Rochman Sudjana, ST
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	11 Jenis dan 30532 Lembar	Rochman Sudjana, ST
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	1860 Orang	Rochman Sudjana, ST
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	141 Kali	Rochman Sudjana, ST
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	Rochman Sudjana, ST

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Rochman Sudjana, ST
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan upah kerja	12 Bulan dan 4 Orang	Rochman Sudjana, ST
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	5 Kendaraan	Rochman Sudjana, ST
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan Jumlah pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional/lapangan	50 Kendaraan dan 45 Kendaraan	Rochman Sudjana, ST
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah penataan halaman kantor Jumlah penataan interior, mabeulair sesuai dengan kebutuhan Presentase gedung kantor	1 Lokal dan 5 Lokal	Rochman Sudjana, ST
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	15	Rochman Sudjana, ST
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	12 Bulan	Iwan Permana, S. IP/ Aceng Dumyana, S. Sos
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan	Jumlah penertiban dan pengamanan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	12 Bulan	Nana Suryana, E Siti Komariah

Massa			
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Kegiatan Trantibum dan Linmas	121 Kali	Rohman Sujana, ST/ Muhlis Ibrahim
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanganan Bencana	200 Kali dan 60 kali	Rohman Sujana, ST
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan Apatur SatpolPP dan Linmas	40 Orang dan 30 Orang	Muhlis Ibrahim/ Wahyu
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan	4 Kali	Dede Setiawan, S. IP
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana SatpolPP dan Linmas	215 Stel dan 6 Unit	Heri Suharman, S. IP
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	12 Bulan	Usep Sunarya, SE/ Dian Hadiansyah, S. IP
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	56 Kali	Kusno Mulyadi, S. IP

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	84 Kali	Aswara, S. IP
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	292 Pelanggar dan 322 Perusahaan	E Siti Komariah
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Aparatur PPNS yang mengikuti Bimtek Pengembangan karir	25	Iwan Permana, S. IP/ Aceng Dumyana, S. Sos

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol.PP Kabupaten Garut.

Selain itu, pada Tabel 4.1 disajikan pula program prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2022.

Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan Satpol.PP Kabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2022 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp. 18.895.097.128-

Tabel 4.5
Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pagu Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						18.895.097.128								
01.05 .01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100%	100%	100%	100%	8.697.840.928						100%	9.567.625.021	
01.05 .01.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	100%	100%	100%	100%	44.000.000						100%	48.400.000	

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05. 01.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	100%	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	44.000.000	Semua Kab/Ko ta semua Kecama tan, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Dokume n Perenca naan SKPD	16 Dokum en	48.400.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
01.05 .01.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD (Satpol PP)	100%				5.984.304.643					100%	6.582.735.107		

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05. 01.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satpol PP)	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5.924.035.643	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Dokume n Laporan Satpol PP	12 Bulan	6.516.439.207	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawah
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05. 01.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD	Jumlah laporan Sat. Pol. PP	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	60.269.000	Semua Kab/Ko ta semua Kecama tan, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Dokume n Laporan Satpol PP	10 Dokum en	66.295.900	Satuan Polisi Pamong Praja	
01.05 .01.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100%		%	100%	694.632.400					100%	764.095.640		

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05. 01.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas BesertaAtribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas lapangan dan Jumlah pakaian dinas tertentu	100%	-	200 stel dan 200 stel	200 stel	694.632.400	Semua Kab/Ko ta semua Kecama tan, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretar iat SatpolPP	200 stel	764.095.640	Satuan Polisi Pamong Praja
01.05 .01.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Satpol PP)	100%				544.422.989						100%	598.865.288	

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05. 01.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	100%	16 Jenis	16 Jenis	16 Jenis	18.518.500	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretar iat SatpolPP	16 Jenis	20.370.350	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05. 01.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor, Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	30 jenis dan 10 Jenis	30 jenis dan 10 Jenis	30 jenis dan 10 Jenis	157.697.529	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretar iat SatpolPP	30 jenis dan 10 Jenis	173.467.282	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05. 01.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan	100%	11 Jenis dan 30532 Lembar	11 Jenis dan 30532 Lembar	11 Jenis dan 30532 Lembar	35.359.720	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretar iat SatpolPP	11 Jenis dan 30532 Lembar	38.895.692	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05. 01.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai/ Tamu	100%	1860 Orang	1860 Orang	1860 Orang	48.840.000	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretar iat SatpolPP	1860 Orang	53.724.000	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05. 01.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	141 Kali	141 Kali	141 Kali	284.007.240	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretar iat SatpolPP	141 Kali	312.407.964	Satuan Polisi Pamong Praja	
01.05 .01.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100%				754.126.800						829.539.480		

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawah
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05 .01.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasiona 1	100%	2 Unit	5 Unit	6 Unit	754.126.800	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretar iat SatpolPP	6 Unit	829.539.480	Satuan Polisi Pamong Praja	
01.05 .01.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Satpol PP)	100%		%	100%	73.972.096					100%	81.369.306		

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05 .01.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	30.412.096	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretar iat SatpolPP	12 Bulan	33.453.306	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05 .01.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan upah kerja pegawai kebersihan	100%			12 Bulan dan 4 orang	43.560.000	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretar iat SatpolPP	12 Bulan dan 4 orang	47.916.000	Satuan Polisi Pamong Praja
01.05 .01.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100%			100%	602.382.000						100%	662.620.200	

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05 .01.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas Jabatan	100%	5 Kendaraa n	5 Kendaraa n	5 Kendaraa n	9.900.000	Semua Kab/Ko ta semua Kecama tan, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sarana dan Prasaran a Satpol PP	5 Kendar aan	10.890.000	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05 .01.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemelihara an, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan Jumlah Pembayaran Pajak kendaraan Dinas Operasional/Lapa ngan	100%	50 Kendaraa n dan 45 Kendaraa n	50 Kendaraa n dan 45 Kendaraa n	50 Unit dan 45 Unit	259.171.000	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sarana dan Prasaran a Satpol PP	50 Unit dan 45 Unit	285.088.100	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05 .01.0 9.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan halaman kantor, jumlah penataan interior, mabeulair sesuai dengan kebutuhan presentase gedung kantor	100%	1 Lokal dan 5 Lokal	1 Lokal dan 5 Lokal	1 Lokal dan 5 Lokal	321.750.000	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sarana dan Prasaran a Satpol PP	1 Lokal dan 5 Lokal	353.925.000	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05 .01.0 9.11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	100%	15 Unit	15 Unit	15 Unit	11.561.000	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sarana dan Prasaran a Satpol PP	15 Unit	12.717.100	Satuan Polisi Pamong Praja	
01.05 .02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentrman dan perlindungan masyarakat	100%		%	90%	10.197.256.200					90%	11.216.981.820		

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05 .02.0 1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentrman umum	75%			90%	9.250.547.200						90%	10.175.601.920	
01.05 .02.0 1.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2.073.179.900	Kab. Garut, semua Kecama tan, Semua Kelurah a	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta	Masyara kat dan Anak Sekolah	12 Bulan	2.280.497.890	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pengamanan, dan Pengawasan										Politik dan Demokrasi				
01.05 .02.0 1.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah penertiban dan pengamanan gangguan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4.077.491.000	Kab. Garut, semua Kecama tan, Semua Kelurah a	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyara kat	12 Bulan	4.485.240.100	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05 .02.0 1.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Kegiatan Trantibum dan Linmas	121 Kali	121 Kali	121 Kali	121 Kali	150.012.500	Kab. Garut, semua Kecama tan, Semua Kelurah a	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretar iat SatpolPP	121 Kali	165.013.750	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05 .02.0 1.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanganan Bencana	50%	200 Kali dan 60 kali	200 Kali dan 60 kali	200 Kali dan 60 kali	261.250.000	Kab. Garut, semua Kecama tan, Semua Kelurah a	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretar iat SatpolPP	200 Kali dan 60 kali	287.375.000	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05 .02.0 1.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Pengawasan Aparatur Satpol PP dan Linmas serta Jumlah peningkatan kapasitas SDM	70%	40 Orang dan 30 Orang	40 Orang dan 30 Orang	40 Orang dan 30 Orang	345.955.000	Kab. Garut, semua Kecama tan, Semua Kelurah a	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Aparatur SatpolPP	40 Orang dan 30 Orang	380.550.500	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05. 02.01. 06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	342.658.800	Kab. Garut, semua Kecama tan, Semua Kelurah a	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Aparatur SatpolPP	4 Kali	376.924.680	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05. 02.01. 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana Prasarana SatpolPP dan Linmas	2000 Stel dan 3536 Orang	215 Stel dan 6 Unit	215 Stel dan 6 Unit	215 Stel dan 6 Unit	2.000.000.000	Kab. Garut, semua Kecama tan, Semua Kelurah a	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretar iat SatpolPP	215 Stel dan 6 Unit	2.200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
01.05. 02.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kot a dan Peraturan Bupati/Wali	Prosentase Penegakan Perda dan Perkada	75%	-	%	85%	676.709.000					85%	744.379.900		

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kota														
01.05. 02.02. .01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	70%	56 Kali	56 Kali	56 Kali	193.600.000	Kab. Garut, semua Kecama tan, Semua Kelurah a	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Aparatur , Masyara kat, Badan Hukum dan Pengusa ha	56 Kali	212.960.000	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05. 02.02. .02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadapPelaksa naannPeraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	42 Kali	84 Kali	84 Kali	84 Kali	72.523.000	Kab. Garut, semua Kecama tan, Semua Kelurah a	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Aparatur , Masyara kat, Badan Hukum dan Pengusa ha	84 Kali	79.775.300	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05. 02.02. .03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	55%	292 Pelanggar dan 322 Perusaha an	292 Pelanggar dan 322 Perusaha an	292 Pelanggar dan 322 Perusaha an	410.586.000	Kab. Garut, semua Kecama tan, Semua Kelurah a	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyara kat, Badan Hukum dan Pengusa ha	292 Pelangg ar dan 322 Perusa haan	451.644.600	Satuan Polisi Pamong Praja	
01.05 .02.0 3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kot a	Presentase penegakan perda dan perkada	25	%	-	90%	270.000.000					90%	297.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang/Urusan /Program/Kegi ata/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.05. 02.03. 01.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Aparatur PPNS yang mengikuti Bimtek Pengembangan karir	25	25 Orang	25 Orang	25 Orang	270.000.000	Kab. Garut, semua Kecama tan, Semua Kelurah a	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkata n Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenterma n dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Aparatur SatpolPP	25 Orang	297.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam menyusun RENJA SKPD Tahun Anggaran 2022 ini, acuan utama yang digunakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD yang merupakan dokumen komprehensif lima tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut selama kurun waktu Satu tahun. Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek kabupaten Garut juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022. Adapun fungsi dari Renja Tahun 2022 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2021 bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2022 merupakan Penjabaran Tahunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tahun 2022 yang memuat prioritas kegiatan dan Pendanaan indikatif. Kondisi terjadinya pandemi global Covid 19 yang mungkin berdampak pada ketidakpastian ketercapaian target, dalam hal ini memaksa perangkat daerah untuk selalu berkolaborasi dan menjaga kesinambungan pelaksanaan program.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Kabupaten Garut, baik

dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang melekat pada Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Kabupaten Garut sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Kabupaten Garut Tahun 2020 masih belum sempurna terkait belum lengkapnya data-data yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi seluruh tabel yang diperlukan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- b. Dalam Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJPM Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Garut dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Kabupaten Garut.
- c. Dalam menyusun Renja SKPD Tahun Anggaran 2022 ini, acuan utama yang digunakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD yang merupakan dokumen komprehensif lima tahunan, arah Kebijakan Umum

- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Garut dan rencana program indikatif dinas yang telah dirembukkan dengan seluruh unsur pelaku pembangunan Pengelolaan Keuangan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Kabupaten Garut.
- d. Renja SKPD Tahun Anggaran 2022 sebagai dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Kabupaten Garut, yang menggambarkan program prioritas pembangunan daerah juga merupakan Acuan dalam penggunaan APBD serta sebagai acuan penyusunan RKA SKPD pada tahun rencana.
- e. Proses penyusunan Renja SKPD Tahun Anggaran 2022 merupakan hasil penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum SKPD, konsultasi publik dan forum lintas pelaku yang dituangkan dalam rencana kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sesuai kewenangannya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka Pencapaian sasaran Perangkat daerah dan program-program yang direncanakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya :

- a. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam Musrenbang;
- b. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas perencanaan dengan memperhatikan peran dan fungsi masing masing perangkat daerah agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berorientasi hasil atau manfaat.
- c. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja kami disusun secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN